

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Percepatan pertumbuhan ekonomi memang berperan sebagai syarat yang strategis bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada aktivitas ekonomi dari masyarakat salah satu sektor yang berperan strategis untuk menggerakkan perekonomian adalah sektor keuangan (Adriani, 2018). Keberadaan sistem keuangan dalam ranah perekonomian nasional dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku ekonomi untuk dapat menjalankan transaksi ekonominya sehingga kontribusi sektor keuangan perlu dioptimalkan dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bank Indonesia, 2017).

Inklusi keuangan UMKM adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat (OJK, 2016). Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan inklusi keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas (Sutanto, 2020).

Beberapa manfaat inklusi keuangan bagi UMKM. Pertama, dalam hal transaksi keuangan dan pencatatannya. Kedua mempermudah akses pendanaan.

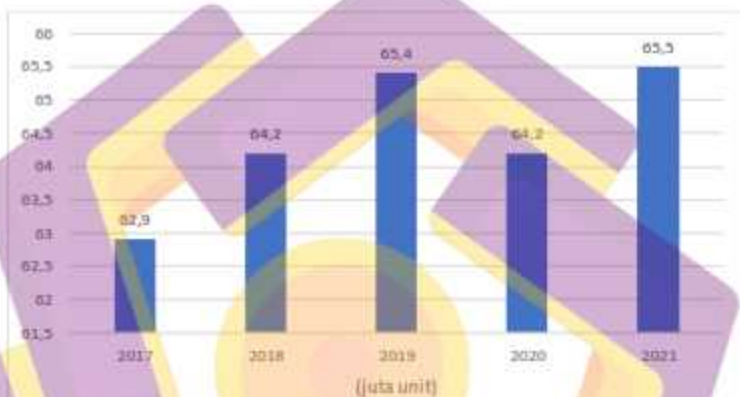
Dengan digitalisasi, UMKM lebih mudah mencari akses pendanaan dari lembaga keuangan. Ketiga akses penjualan yang lebih luas menasar ke kalangan yang adaptif dengan teknologi seperti generasi milenial dan Z. keempat, kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital. Dengan QRIS dan integrasi pembayaran bisa memicu digitalisasi UMKM untuk sektor keuangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usah mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran (Saefudin, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mendefinisikan UMKM sebagai suatu unit ekonomi yang melakukan aktivitas dengan tujuan menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab dan punya kewenangan untuk mengelola usaha tersebut. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam

mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa Indonesia pada periode tahun 1997–1998, hanya UMKM yang mampu berdiri kokoh (Bank Indonesia, 2015). Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik melalui *website* resminya pada tahun 2017-2021 jumlah UMKM sebagai berikut,



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM di Indonesia Tahun 2017-2021 (juta unit)

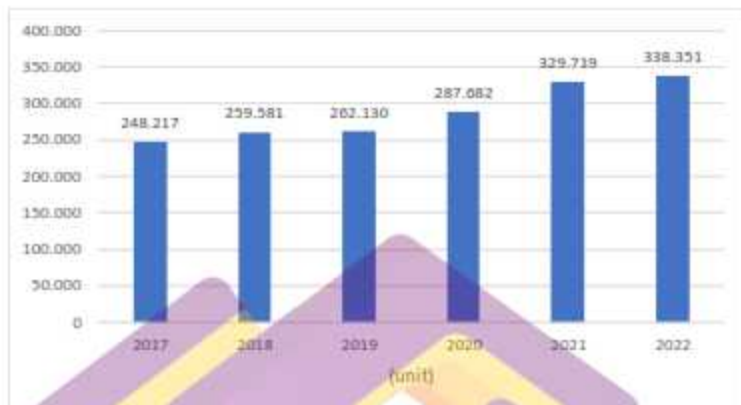
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah, 2022

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan bahwa jumlah pertumbuhan UMKM di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 62,9 juta unit usaha UMKM kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 64,2 juta unit UMKM kemudian kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 65,4 juta unit. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan UMKM mengalami penurunan sebesar 64,2 juta unit atau turun sebesar 1,2 juta unit dari tahun sebelumnya (2019). Penurunan tersebut diakibatkan pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan profit usaha menurun akibat biaya produksi tetap atau bahkan meningkat sementara penjualan menurun.

Kemudian pada tahun 2021 jumlah UMKM kembali mengalami kenaikan sebesar 65,5 juta unit.

Pada perekonomian di Indonesia, sektor UMKM menjadi kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan mampu bertahan pada situasi krisis ekonomi. Kontribusi tersebut tercermin dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar, kontribusi terhadap PDB yang tinggi serta peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam kegiatan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 mengungkapkan setidaknya terdapat empat poin tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam upaya pengembangan UMKM yaitu skala yang relatif masih kecil, koneksi terhadap rantai pasokan yang masih terbatas, akses terhadap pembiayaan yang masih rendah dan penerapan teknologi dan digitalisasi yang masih rendah (DJPB Yogyakarta, 2022).

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, budaya, pariwisata, dan kota kreatif. Banyak objek-objek wisata seperti wisata alam, sejarah, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Objek-objek wisata dan hasil industri kreatif berupa oleh-oleh menjadi magnet yang kuat bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Tingginya wisatawan memicu tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data statistik Bappeda DIY menunjukkan peningkatan jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun ke tahun seperti berikut,



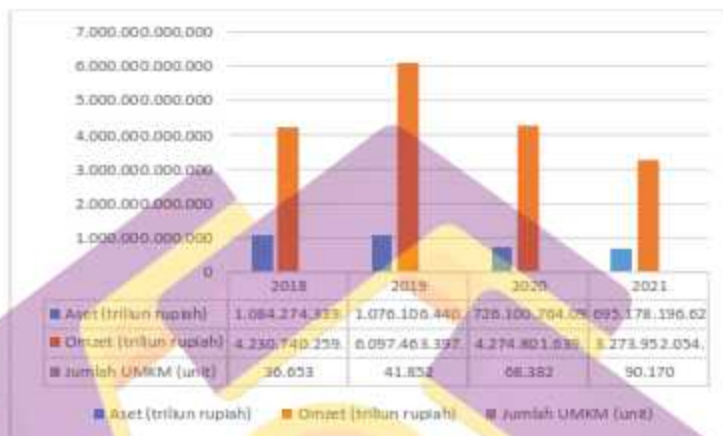
Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (unit)

Sumber: BAPPEDA DIY, Diolah, 2022

Berdasarkan grafik 1.2 menjelaskan bahwa jumlah pertumbuhan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan 7,48 persen per tahun. Di tahun 2018, DIY mempunyai UMKM sebanyak 259,581 unit, meningkat menjadi 262.130 unit di tahun 2019 kemudian meningkat lagi 287.682 di tahun 2020 unit sehingga di tahun 2021 mencapai 329.719 unit. Sampai dengan tahun 2022, UMKM di DIY terus tumbuh mencapai 338.351 unit.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sleman memperlihatkan dari lima Kabupaten/Kota di DIY secara jumlah UMKM terbanyak yaitu berada di Kabupaten Sleman sebanyak 90.170 unit UMKM di tahun 2021, urutan kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 86.968 unit, kemudian disusul oleh Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 53.958 unit, lalu Kabupaten Kulon Progo sebanyak 36.135 unit, dan paling rendah adalah Kota

Yogyakarta sebanyak 32.777 unit UMKM. Data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Sleman seperti berikut,



Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Jumlah UMKM, Aset, dan Omzet di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Sumber: Dinkopukm Sleman, Diolah, 2022

Berdasarkan grafik 1.3 pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan dari sisi omzet dan aset UMKM di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 omzet UMKM sebesar Rp. 4.274.801.639.970, kemudian pada tahun 2021 omzet UMKM mengalami penurunan lagi sebesar Rp. 3.273.952.054.384 triliun. Dari segi aset UMKM dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan pada tahun 2019 aset UMKM sebesar Rp. 1.076.106.440 triliun sampai pada tahun 2021 penurunan aset UMKM sebesar Rp. 695.178.196,62. Penurunan omzet dan aset pelaku UMKM disebabkan adanya pandemi *covid-19* dan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemodalan menjadi salah satu kendala dan tantangan yang saat ini masih dihadapi para pelaku UMKM Kabupaten Sleman. Modal merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha. Kurangnya modal dalam pengembangan UMKM karena usaha tersebut bersifat perorangan serta sifatnya yang tertutup sehingga menyebabkan terbatasnya modal yang dimiliki oleh si pemilik (Bappeda DIY, 2022).

Teknologi dan internet yang sedemikian maju saat ini perlu dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu cara pemanfaatan dalam kegiatan pemasaran adalah dengan penerapan promosi menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Teknologi merupakan alat untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan sumber daya menjadi lebih praktis dan efisien dengan dimanfaatkannya teknologi. Internet merupakan salah satu contoh teknologi yang berkembang di masyarakat saat ini. Internet yang berkembang sedemikian maju menciptakan banyak perubahan, seperti finansial teknologi (*fintech*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan keuangan menggunakan teknologi sangat membantu dalam kegiatan bertransaksi karena semakin praktis dan efisien (Rahardjo, 2019).

Fintech adalah sebuah proses perubahan antara layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis, yang pada awalnya bertatap muka dalam bertransaksi dan membawa sejumlah uang, tetapi sekarang dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dalam waktu singkat. Dalam situasi bisnis yang kompetitif, *fintech* mampu mempermudah konsumen dalam

bertransaksi. Perkembangan *fintech* dapat membawa perubahan yang menghadirkan kemudahan dalam berbisnis (Afnan dkk, 2020).

Pesatnya pertumbuhan industri *financial technology (fintech)* membawa angin segar bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Industri *fintech* dinilai bisa ikut penyaluran permodalan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah. Keberadaan pinjaman online melalui *fintech* diharapkan mampu mendorong berkembangnya sektor usaha UMKM khususnya di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data statistik OJK per Agustus 2022, total penyaluran pinjaman untuk periode Januari-Agustus 2022 telah mencapai Rp 148,83 triliun dengan kontribusi penyaluran ke UMKM atau sektor produktif Rp 70,65 triliun. Dari total penyaluran tersebut, sebanyak Rp 1,96 triliun telah disalurkan *fintech* pendanaan bersama di DIY.

Meningkatnya perkembangan penyaluran dana dari *fintech*, salah satunya karena kemudahan persyaratan meminjam *fintech* dibandingkan dengan dengan perbankan dan sumber permodal lainnya. Aturan meminjam *fintech* yang lebih longgar menjadi salah satu alasan masyarakat memilih kredit online dibandingkan bank. Pada akhirnya, *fintech* menjadi pelengkap peran perbankan untuk menyalurkan dana usaha ke UMKM (Andaiyani, Sri et al. 2020).

Menurut Rumondang (2019) jenis-jenis layanan *Fintech* yang dapat ditemui adalah:

1. Layanan dana digital: Satu peminjam dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor. Contoh layanan dana digital dari *fintech* adalah penyediaan aplikasi seperti Modalku dan Investree.

2. Layanan pembayaran digital: Layanan pembayaran digital ini memudahkan customer untuk melakukan transaksi tanpa waktu yang lama dan dapat dilakukan menggunakan internet kapan saja. Contoh layanan pembayaran digital dari *fintech* pembayaran adalah aplikasi OVO, GoPay, atau Dana
3. Layanan pengaturan keuangan: Layanan pengaturan keuangan seperti jasa yang menyediakan pengelolaan dana dan jasa konsultasi keuangan tanpa dipungut biaya apapun. Adapun contoh layanan yang diberikan seperti Bareksa, Finansialku, atau TanamDuit.

Bidang keuangan merupakan salah satu bidang yang berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa juga dikatakan teknologi telah memasuki bidang keuangan. Secara bertahap teknologi tumbuh cukup cepat untuk mengubah industri keuangan ke era digital. Perpaduan antara teknologi dan keuangan sering diartikan sebagai *financial technology (fintech)*. Dengan hadirnya *fintech* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian tentang peran *fintech* terhadap UMKM, temuan penelitian dari Arisia (2020) menyatakan bahwa kehadiran sejumlah *fintech* turut memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM. Peran *fintech* tidak hanya sebatas dalam pembiayaan modal usaha tetapi ada juga yang merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan.

Penelitian tentang peran *fintech* terhadap UMKM oleh Irmawati dkk (2018) menyatakan bahwa kehadiran sejumlah *fintech* turut memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM. Peran *fintech* tidak hanya sebatas dalam

pembiayaan modal usaha tetapi ada juga yang merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan.

Sedangkan penelitian Yahya & Rahayu (2020) menjelaskan variabel *customer trust* terhadap *intention adopt fintech* memiliki dampak yang positif, dan variabel *intention adopt fintech* berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Penelitian lebih lanjut dari Julialevi (2020) menyatakan bahwa kehadiran fintech dapat berpengaruh positif terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan UMKM pada wilayah Purwokerto.

Liliana (2021) menyatakan bahwa *fintech* telah menyerap banyak perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan berbagai fitur layanan dari financial, perbankan, dan asuransi. Maka diperlukan upaya agar masyarakat dalam hal ini khususnya usaha menengah terus melakukan usahanya dengan layanan *fintech*. Salah satu aspek untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah melalui peran *fintech* (Muzdalifa, 2018). Layanan keuangan melalui *fintech* dapat berupa pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, keberadaan *fintech* sangat membantu para pelaku UMKM baik dalam segi mendapatkan modal usaha, transaksi keuangan digital ataupun perencanaan keuangan dan investasi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fintech Terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Kabupaten Sleman”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *fintech risk and invesment management* terhadap inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengaruh *fintech payment, settlement and clearing* terhadap inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pengaruh *fintech market aggregator* terhadap inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis peran *risk and invesment management* dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji dan menganalisis peran *payment, settlement, and clearing* dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji dan menganalisis peran *market aggregator* dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memahami peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM di Kabupaten Sleman

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai kontribusi mendapatkan pengetahuan dan kesadaran akan dampak fintech terhadap inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Sleman.

b. Bagi UMKM

Sebagai bahan pertimbangan yang dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan untuk menggunakan fintech serta mengetahui apakah meningkatkan pendapatan dan laba bersih UMKM setelah menggunakan fintech.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan fintech untuk memperluas area inklusi keuangan.

1.5. Sistematika Bab

Dalam penelitian ini terdapat (5) sistematika penulisan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah mengenai latar belakang terkait landasan pemikiran, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan penulisan sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab II ini berisikan landasan teori baik teori yang dikemukakan oleh para ahli maupun teori yang mendukung dan menguatkan penelitian ini. selain itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kerangka berfikir dan hipotesis atau dugaan sementara hasil penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III ini menjelaskan dan memberikan gambaran tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional serta yang terakhir adalah teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini membahas mengenai hasil analisis yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan alat dan teknik analisis yang sudah direncanakan pada bab III serta memberikan kesimpulan serta pembahasan mengenai hasil yang sudah dianalisis.

BAB V KESIMPULAN

Sistematika terakhir dalam penelitian ini adalah menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan pada bab IV dan memaparkan saran serta kritik yang berkaitan dengan penelitian yang akan datang.